

Kajian Peran *Stakeholder* dalam Pengelolaan Sub DAS Ciwidey Kabupaten Bandung

Adhyasta Firdaus*, Ernady Syaodih, Nia Kurniasari

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*fadhya@gmail.com, ernadysyaodih@gmail.com, niawitaresna@gmail.com

Abstract. The form of land use in an area is related to population growth and activities. The increasing number of residents in a place will have an impact on increasing changes in land use. Floods, as a result of these changes, have significant impacts on society, the economy and the environment. This research aims to identify obstacles in managing the Ciwidey Sub-watershed, Bandung Regency, map the relationships between actors involved in managing the Ciwidey Sub-watershed, Bandung Regency, and formulates efforts to manage the Ciwidey Sub-watershed, Bandung Regency. Analysis methods include description and MACTOR analysis. The identified obstacles involve a lack of effective cooperation between agencies, non-functioning of the land which reduces water absorption, lack of contribution from tourism entrepreneurs, sub-optimal economic empowerment of local communities, and lack of optimization of disaster mitigation. Analysis of the role of stakeholders shows the strength of influence of the Bandung Regency DPRD, BBWS Citarum, and the Bandung Regency PUTR Service. Management efforts are directed by the priority scale identified by stakeholders, including increasing disaster mitigation, improving cooperation between agencies, handling land conversion, increasing the role of tourism entrepreneurs in conservation, and empowering the agricultural economy of local communities.

Keywords: *Flood, Land functional transfer, MACTOR*

Abstrak. Bentuk penggunaan lahan suatu wilayah terkait dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya, semakin meningkatnya jumlah penduduk di suatu tempat akan berdampak pada makin meningkatnya perubahan penggunaan lahan. Banjir, sebagai hasil dari perubahan tersebut, memiliki dampak signifikan pada masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung, memetakan hubungan antar aktor yang terlibat dalam pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung, dan merumuskan upaya pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung. Metode analisis melibatkan deskripsi dan analisis MACTOR. Kendala-kendala teridentifikasi melibatkan kurangnya efektivitas kerjasama antar instansi, alih fungsi lahan yang mengurangi resapan air, kurangnya kontribusi pengusaha wisata, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal yang belum optimal, dan kurangnya optimalisasi mitigasi bencana. Analisis peran stakeholder menunjukkan kekuatan pengaruh DPRD Kabupaten Bandung, BBWS Citarum, dan Dinas PUTR Kabupaten Bandung. Upaya pengelolaan diarahkan oleh skala prioritas yang diidentifikasi oleh stakeholder, termasuk peningkatan mitigasi bencana, perbaikan kerjasama antar instansi, penanganan alih fungsi lahan, peningkatan peran pengusaha wisata dalam pelestarian, dan pemberdayaan ekonomi pertanian masyarakat lokal.

Kata Kunci: *Alih Fungsi Lahan, Banjir, MACTOR.*

A. Pendahuluan

Lahan merupakan bagian dari ruang yang merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada lahan. Penggunaan lahan merupakan hasil akhir dari setiap bentuk campur tangan kegiatan (intervensi) manusia terhadap lahan di permukaan bumi yang bersifat dinamis dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup baik material maupun spiritual (1).

Sungai Ciwidey kembali meluap akibat hujan deras yang melanda wilayah Kecamatan Ciwidey dan Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (15/6/2022), Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Uka Suska Puji mengatakan, luapan sungai Ciwidey menyebabkan banjir bandang dan melanda permukiman warga. Kejadian-kejadian banjir di Sub-DAS Ciwidey diduga akibat perubahan penggunaan lahan yang meningkatkan koefisien aliran permukaan (2).

Saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung lebih menonjolkan sisi pariwisata yang dampaknya bisa memicu alih fungsi lahan dari hutan atau pertanian menjadi sarana wisata. Walhi Jawa Barat mencatat sudah banyak hotel, penginapan, restoran dan pariwisata berkonsep alam yang dibangun di Bandung selatan. Padahal menurut Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Meiki W Paendong, pembangunan yang tepat untuk Bandung selatan adalah pertanian (3).

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 42 ayat 1 disebutkan bahwa rencana tata ruang dilaksanakan dan ditegakkan dengan mengacu pada upaya pengurangan risiko bencana, mulai dari penerapan peraturan kebijakan, standar keselamatan, sampai dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi (4). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai pasal 42 disebutkan bahwa pelaksanaan pengelolaan DAS menjadi wewenang dan tanggung jawab menteri dan menteri terkait sesuai kewenangannya untuk DAS lintas negara dan lintas provinsi, Gubernur sesuai kewenangannya untuk DAS dalam provinsi dan / atau lintas Kabupaten atau Kota, dan Bupati / Walikota sesuai kewenangannya untuk DAS dalam Kabupaten / Kota.

Dalam pelaksanaan pengelolaan Sub-DAS Ciwidey, peran stakeholder mencakup beberapa aspek yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, di mana partisipasi aktif masyarakat dianggap penting untuk mendukung pelestarian lingkungan. Ketidakseimbangan kepentingan antara stakeholder, di mana beberapa lebih fokus pada pembangunan ekonomi sementara yang lain mendukung pelestarian lingkungan, ketidakseimbangan ini dapat memperlambat pengambilan keputusan. Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang dapat menghambat diskusi terbuka dan partisipasi yang efektif. Selain itu, masalah lain mencakup penggunaan sumber daya yang tidak berkelanjutan, kurangnya kepatuhan terhadap peraturan, dan ketidaksetaraan yang dapat merugikan masyarakat miskin. Untuk mengatasi hal – hal tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, membangun dialog antara stakeholder, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa kebijakan pengelolaan Sub-DAS Ciwidey mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja kendala pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana pemetaan peran stakeholder dalam pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana upaya pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung?
Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.
 1. Mengidentifikasi kendala pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung.
 2. Memetakan peran hubungan antar aktor dalam pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung.
 3. Merumuskan upaya dalam pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode teknik analisis MACTOR dan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan *mix methode*. korelasional dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Wilayah studi yang diambil dalam penelitian ini merupakan Kawasan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan beberapa cara seperti observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Dengan tujuan analisis terhadap peran antar stakeholder dan upaya dalam pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung yang dilihat dari berbagai aspek, mulai dari kondisi fisik dan penggunaan lahan, kondisi demografi kependudukan dan sosial budaya, kondisi infrastruktur penunjang DAS serta kondisi kelembagaan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis MACTOR

MACTOR adalah analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi pergerakan aktor (stakeholder) dan strategi untuk menyelesaikan masalah. Hasil analisis MACTOR penelitian ini menunjukkan aktor-aktor utama dalam pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung dan tujuan utama mereka, atau program prioritas.

Matriks Pengaruh Langsung / *Matrix of Direct Influences (MDI)*

Matriks ini berisikan data penilaian antar aktor yang akan digunakan dalam proses analisis. Keterkaitan aktor pada matriks ini dilihat dari pengaruh aktor tersebut terhadap aktor-aktor lainnya baik dari segi prosedural, keberhasilan kerja, misi, ataupun eksistensi lembaga. Pengaruh dinilai dari 0 hingga 4 sesuai dengan pentingnya kemungkinan risiko (*jeopardy*) yang dialami aktor:

- 0: Tidak ada pengaruh/ *No influence*
- 1: Operasi Prosedur/ *Operating procedures*
- 2: Proyek/ *Project*
- 3: Misi/ *Missions*
- 4: Keberadaan/ *Existence*

Adapun matriks pengaruh langsung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Matriks Pengaruh Langsung Aktor Terhadap Aktor

MDI	BBWSC	BAPPEDA	PUTR	DPRD	LSM	KEC	DESA	WISATA
BBWSC	0	4	4	1	2	4	3	3
BAPPEDA	2	0	2	3	4	2	2	4
PUTR	4	2	0	1	3	3	4	2
DPRD	2	2	4	0	2	4	4	3
LSM	3	1	1	2	0	2	2	3
KEC	2	4	4	2	2	0	2	1
DESA	1	2	1	2	3	2	0	3
WISATA	2	3	3	3	3	4	1	0

© LIPSOR-EPITA-MACTOR

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

Matriks Posisi Penilaian / *Matrix of Valued Position Actor Objective (2MAO)*

Matriks ini merupakan matriks yang berisikan data penilaian aktor yang memberikan informasi mengenai keterkaitan antar aktor dengan masing-masing tujuan. Matriks ini diisi dengan menilai pentingnya isu – isu terkait peran stakeholder dalam pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung. Penilaian positif menunjukkan ketersetujuan aktor terhadap suatu tujuan baik dari controlling, keberhasilan kerja, misi, dan eksistensi. Sedangkan, penilaian aktor menunjukkan

ketidaksetujuan aktor terhadap suatu tujuan baik dari segi keberhasilan kerja, misi, dan eksistensi.

Tabel 2. Matriks Posisi Penilaian Aktor Terhadap Tujuan

2MAO	A1	A2	A3	B1	B2	C1	C2	C3	D1	D2	E1	F1	F2	B3	C4	D3
BBWSC	-3	3	4	3	2	4	2	3	4	-3	-1	3	2	-2	2	3
BAPPEDA	2	3	3	3	2	3	4	-2	3	-2	1	2	3	2	3	3
PUTR	2	3	1	3	2	4	3	4	4	-3	4	-4	3	2	3	3
DPRD	-4	2	-2	-3	2	-4	4	3	3	4	1	-2	-3	2	2	2
LSM	-3	2	-4	-2	-3	4	4	-2	3	4	-3	-4	3	2	3	-2
KEC	-3	2	-3	-3	4	4	3	-2	3	2	-4	3	3	3	1	-3
DESA	-2	2	-2	-3	3	2	3	-3	3	2	-2	3	2	3	4	2
WISATA	2	3	-4	4	4	4	-2	3	2	-3	3	4	4	4	1	2

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung / *Matrix of Direct and Indirect Influences (MDII)*
 Tingkatan nilai dapat dilihat jika semakin tinggi nilai (Ii) dan (Di) maka sebesar juga pengaruhnya tersebut bagi aktor lainnya ataupun semakin bergantungnya terhadap aktor lainnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Matriks Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

MDII	BBWSC	BAPPEDA	PUTR	DPRD	LSM	KEC	DESA	WISATA	Ii
BBWSC	14	17	16	14	18	17	15	16	113
BAPPEDA	14	14	14	14	17	17	14	17	107
PUTR	15	15	14	12	15	16	15	15	103
DPRD	15	16	17	13	17	18	17	15	115
LSM	12	14	13	12	13	14	12	13	90
KEC	14	14	13	12	16	14	15	15	99
DESA	13	12	12	13	14	13	11	13	90
WISATA	15	15	16	13	16	17	15	15	107
Di	98	103	101	90	113	112	103	104	824

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

Pada hasil matriks diatas sangat dibutuhkan dikarenakan menghitung keseimbangan kekuatan antar aktor bergantung kepada posisi setiap aktor. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

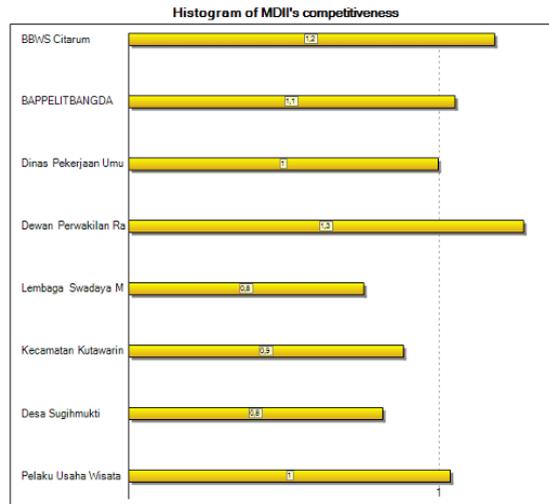
Tabel 4. Skala Bersih Pengaruh (*Net Scale*)

NS	BBWSC	BAPPEDA	PUTR	DPRD	LSM	KEC	DESA	WISATA	Sum
BBWSC		3	1	-1	6	3	2	1	15
BAPPEDA	-3		-1	-2	3	3	2	2	4
PUTR	-1	1		-5	2	3	3	-1	2
DPRD	1	2	5		5	6	4	2	25
LSM	-6	-3	-2	-5		-2	-2	-3	-23
KEC	-3	-3	-3	-6	2		2	-2	-13
DESA	-2	-2	-3	-4	2	-2		-2	-13
WISATA	-1	-2	1	-2	3	2	2		3

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

Nilai (+) aktor memberikan lebih banyak pengaruh daripada yang diterimanya
 Nilai (-) aktor memberikan pengaruh yang lebih kecil daripada yang diterimanya

Total pengaruh bisa tiap aktor diatas dapat dijadikan data untuk memperhitungkan koefisien keseimbangan kekuatan aktor/balance of power seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Daya Saing Aktor dalam Pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung

Gambar diatas menunjukkan hasil matriks daya saing aktor/ Matrix of Direct and Indirect Influences (MDII) terhadap Pembangunan di Kabupaten Pangandaran, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai nilai (Ri) = 1 atau >1 berarti daya saing aktor dianggap maksimal atau aktor memiliki pengaruh yang sangat tinggi dan ketergantungan yang rendah.

Hubungan Tujuan-Aktor / Actor Objectives Relationship (IMAO)

Matriks hubungan tujuan-aktor ini merupakan matriks untuk mengetahui valensi dari masing-masing aktor. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5. Matriks Hubungan Tujuan-Aktor (IMAO) dalam Pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung

IMAO	A1	A2	A3	B1	B2	C1	C2	C3	D1	D2	E1	F1	F2	B3	C4	D3	Absolute sum
BBWSC	-1	1	1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	16
BAPPEDA	1	1	1	1	1	1	1	-1	1	-1	1	1	1	1	1	1	16
PUTR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-1	1	-1	1	1	1	1	16
DPRD	-1	1	-1	-1	1	-1	1	1	1	1	1	-1	-1	1	1	1	16
LSM	-1	1	-1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1	-1	1	1	1	-1	16
KEC	-1	1	-1	-1	1	1	1	-1	1	1	-1	1	1	1	1	-1	16
DESA	-1	1	-1	-1	1	1	1	-1	1	1	-1	1	1	1	1	1	16
WISATA	1	1	-1	1	1	1	-1	1	1	-1	1	1	1	1	1	1	16
Number of agreements	3	8	3	4	7	7	7	4	8	4	4	5	7	7	8	6	
Number of disagreements	-5	0	-5	-4	-1	-1	-1	-4	0	-4	-4	-3	-1	-1	0	-2	
Number of positions	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

- Keterangan :
- 1= Tidak mungkin actor mencapai tujuan
 - 0 = Posisi netral
 - 1 = Aktor kemungkinan besar akan mencapai tujuan

Setelah memperhitungkan koefisien keseimbangan kekuatan aktor/balance of power (Ri) di atas dapat diketahui Matriks posisi bernilai tertimbang (3MAO). Matriks posisi bernilai tertimbang (3MAO) ini dihitung menggunakan data yang terdapat pada matriks posisi penilaian (2MAO) dan koefisien keseimbangan kekuatan aktor/balance of power (Ri). Pada kolom mobilisasi dapat dilihat dari nilai terbesar sampai nilai terendah.

Tabel 6. Peringkat Mobilisasi Antra Aktor Terhadap Tujuan

Aktor	Mobilisasi	Peringkat
DPRD Kabupaten Bandung	54.7	1
BBWS Citarum	51.8	2
Pelaku Usaha Wisata	50.8	3
Dinas PUTR Kabupaten Bandung	47.9	4
BAPPEDA Kabupaten Bandung	43.2	5
Kecamatan	40.8	6
LSM	36.4	7
Desa	33.6	8

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

Konvergensi Antar Aktor / *Convergence Between Actors (CAA)*

Konvergensi aktor dalam analisis mactor ini menggambarkan kesamaan sikap aktor terhadap tujuan. Konvergensi ini untuk mengetahui titik-titik kemungkinan aliansi potensial aktor/stakeholder.

Hasil matriks ini menunjukkan bahwa dalam tujuan pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung, desa memiliki nilai tertinggi yaitu 80. Kemudian Kecamatan memiliki nilai tertinggi kedua dengan nilai 76. Kemudian BAPPELITBANGDA memiliki nilai tertinggi ketiga dengan nilai 76. Stakeholder memerlukan keterlibatan aktor lain dalam melaksanakan perannya melaksanakan pengelolaan Sub DAS Ciwidey dengan koordinasi dan sistem yang baik.

Divergensi Antar Aktor / *Divergence Between Actors (DAA)*

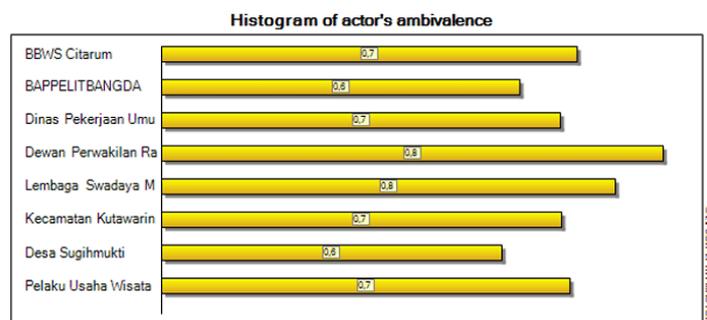
Berdasarkan hasil divergensi antar aktor diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung memiliki nilai divergensi tertinggi dengan nilai 46 yang berarti DPRD Kabupaten Bandung tidak memegang posisi atau kepentingan dengan aktor lainnya dengan kata lain memiliki kepentingan yang berbeda dengan aktor/stakeholder untuk mencapai tujuan. Selain itu tidak ada aktor yang berada di posisi netral yang ditandai dengan nilai konvergensi "0" yang berarti netral/acuh tak acuh yang menandakan semua aktor memiliki sikap dan kepentingan masing – masing dalam pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung. Selanjutnya, divergensi antar aktor dipetakan dalam gambar peta divergensi antar aktor (1DAA) Pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Pada divergensi antar aktor (1DAA) menunjukkan bahwa terkait pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung terdapat divergensi yang tinggi antara Pelaku Usaha Wisata dengan Lembaga Swadaya Masyarakat. Sedangkan matriks nilai tertimbang (3DAA) menunjukkan hasil nilai pada tabel matriks divergensi antar aktor (3DAA) dalam pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung memiliki nilai divergensi tertinggi yaitu 147,7. Desa memiliki nilai divergensi terendah yaitu 78,8. Hal ini memiliki kemungkinan bahwa antara DPRD Kabupaten Bandung dan Desa pada 20 tahun mendatang dalam mencapai tujuan memiliki perbedaan berkenaan dengan kepentingan dan peran seiring dengan rencana di masa mendatang.

Aktor Ambivalensi / *Actor Ambivalence*

Berdasarkan hasil analisis, hasil nilai aktor ambivalensi memiliki nilai < 1 untuk 8 aktor/stakeholder yang berperan dalam pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung. Sehingga, dapat diartikan bahwa aktor yang meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Pelaku Usaha Wisata, Kecamatan, Desa, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Aktor ambivalensi ini menilai antar aktor pada setiap Lembaga. Apabila mereka ingin menjadi mitra, mereka harus bekerjasama hanya pada tujuan bersama tersebut dan mengesampingkan tujuan mereka yang berbeda. Indikator ambivalensi ini bervariasi dari 1

(aktor yang sangat ambivalen) hingga 0 (bukan aktor ambivalen).



Gambar 2. Nilai Ambivalensi Antar Aktor dalam Pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung

Kendala Pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan Sub-DAS Ciwidey, tidak semua program yang dijalankan berjalan dengan lancar. Pada proses identifikasi masalah atau kendala yang dilakukan oleh peneliti baik secara primer maupun sekunder didapatkan kendala – kendala dalam pelaksanaan pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung. Adapun kendala yang didapatkan cukup selaras dengan isu – isu strategis yang telah dirumuskan oleh peneliti sebelumnya. Untuk kendala dalam pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung selengkapny dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kerjasama antar instansi yang dinilai masih kurang efektif
2. Masih adanya alih fungsi lahan
3. Peran pengusaha yang dinilai masih kurang terhadap pengelolaan sungai
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal masih belum efektif
5. Mitigasi bencana yang dinilai masih belum optimal
6. Pemetaan Peran *Stakeholder* Dalam Pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung

Berdasarkan hasil analisis mactor pemetaan peran stakeholder terhadap pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung dapat dilihat pada gambar 3. Peta pengaruh langsung dan tidak langsung antar aktor menunjukkan peran stakeholder secara eksisting dalam Pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung sebagai berikut:

1. Kuadran 1 (Influences stakeholders)

Aktor/Stakeholder yang berada pada kuadran I merupakan penentu sekaligus aktor yang memiliki pengaruh sangat tinggi dan ketergantungan rendah terhadap aktor yang menempati kuadran II, III dan IV. Selain itu, stakeholder yang berada pada kuadran I menjadi aktor yang mandiri sehingga mampu mempengaruhi stakeholder lainnya. Aktor – aktor tersebut diantaranya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung.

2. Kuadran 2 (Relay stakeholders)

Aktor/Stakeholder yang berada pada kuadran 2 merupakan aktor yang memiliki pengaruh tinggi serta ketergantungan tinggi terhadap aktor lain dalam pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung. Aktor ini sangat membutuhkan dukungan berupa pelaksanaan kebijakan, program kerja, arahan rencana, serta pendanaan dari aktor lain dan aktor ini tidak dapat berdiri sendiri. Adapun aktor – aktor yang berada pada kuadran 2 ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Bandung dan Pelaku usaha wisata.

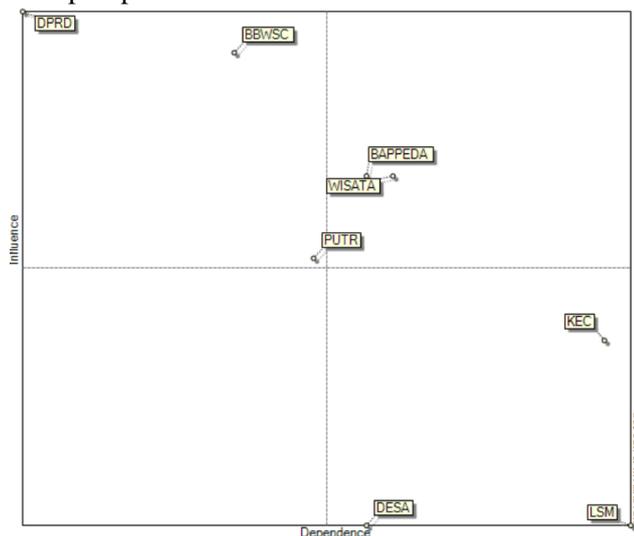
3. Kuadran 3 (Dependence stakeholders)

Aktor/Stakeholder yang berada pada kuadran 3 merupakan aktor yang memiliki pengaruh rendah serta ketergantungan tinggi terhadap aktor lain dalam pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung. Aktor yang terdapat pada kuadran 3 ini diantaranya adalah

Kecamatan, Desa, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

4. Kuadran 4 (Autonomous stakeholders)

Aktor/Stakeholder yang berada pada kuadran 4 merupakan aktor yang memiliki pengaruh rendah serta ketergantungan rendah terhadap aktor lain dalam pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung. Keberadaan aktor yang berada pada kuadran 4 tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap isu atau tujuan strategis dalam pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung. Dalam analisis mactor yang dilakukan di penelitian ini tidak didapatkan aktor yang menempati posisi kuadran 4 ini.



Gambar 3. Peta Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Antar Aktor

Upaya Pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung

Upaya pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung ini dirumuskan dari hasil analisis mactor yaitu matriks hubungan tujuan dengan aktor (3MAO) yang menghasilkan skala prioritas tujuan berdasarkan Ranking degree of mobilisation hasil penilaian aktor yang dapat dilihat pada tabel 5.9 Skala prioritas berdasarkan ranking degree of mobilisation hasil penilaian aktor.

Tabel 7. Skala Prioritas Tujuan Berdasarkan Peningkatan Nilai Mobilisasi Penilaian Aktor

Kode	Tujuan	<i>Degree of mobilisation</i>	Peringkat
C1	Meningkatkan upaya mitigasi bencana di wilayah Sub DAS Ciwidey	29.3	1
D1	Meningkatkan kerjasama antar instansi	25.1	2
C2	Perlu adanya upaya penanganan alih fungsi lahan	24.9	3
F1	Meningkatkan peran pengusaha wisata dalam pelestarian Sub DAS Ciwidey	24.5	4
B1	Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi pertanian masyarakat lokal	24.3	5
D2	Adanya tumpang tindih kebijakan dalam pengelolaan Sub Das Ciwidey	23.3	6
F2	Tingginya jumlah wisatawan dapat berpengaruh terhadap kawasan wisata sekitar Sub DAS Ciwidey	23.0	7

Lanjutan Tabel 7. Skala Prioritas Tujuan Berdasarkan Peningkatan Nilai Mobilisasi Penilaian Aktor

Kode	Tujuan	<i>Degree of mobilisation</i>	Peringkat
A3	Penggunaan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan hidup oleh masyarakat	22.9	8
C3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup akibat aktivitas masyarakat	22.3	9
A1	Kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	21.4	10
B2	Peningkatan PAD Pemda Kabupaten Bandung	21.4	11
A2	Penyuluhan mengenai pelestarian lingkungan hidup	20.3	12
D3	Menerapkan kebijakan atau aturan terkait alih fungsi lahan	20.1	13
B3	Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di kawasan Sub DAS oleh pemerintah	19.8	14
C4	Pengendalian kawasan lahan kritis di sekitar Sub DAS Ciwidey	18.5	15
E1	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pendukung Sub DAS Ciwidey	18.1	16

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

Untuk nilai tertinggi ranking degree of mobilisation yaitu meningkatkan upaya mitigasi bencana di wilayah Sub-DAS Ciwidey dengan nilai sebesar 29,3. Hasil penilaian aktor ini akan membantu dalam mengatur waktu, sumber daya, dan tindakan yang diperlukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan prioritas sebagai upaya pengelolaan Sub-DAS Ciwidey. Setiap skala prioritas dibuat secara terpisah dan memperhatikan dampak, urgensi, dan kepentingan masing – masing dengan pertimbangan sesuai kondisi dilapangan. Berikut merupakan skala prioritas pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung:

1. Meningkatkan upaya mitigasi bencana di wilayah Sub DAS Ciwidey
2. Meningkatkan kerjasama antar instansi
3. Perlu adanya upaya penanganan alih fungsi lahan
4. Meningkatkan peran pengusaha wisata dalam pelestarian Sub DAS Ciwidey
5. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi pertanian masyarakat lokal

Upaya – upaya dalam pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung berdasarkan skala prioritas diatas saling berkaitan dengan upaya penanganan yang dilakukan dalam dokumen Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum 2019 – 2025. Penentuan upaya penanganan dalam 130 renaksi yang berkaitan dalam dokumen RENAKSI PPK DAS Citarum 2019 – 2025 tersebut diantaranya adalah mengidentifikasi kegiatan penanganan banjir, mitigasi bencana, pengembangan wisata berwawasan lingkungan, dan identifikasi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang. Kerjasama antar stakeholder sangat berperan penting dalam terlaksananya upaya – upaya penanganan tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diambil kesimpulan pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kendala yang ada dalam pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung mencakup masalah kerjasama antar instansi yang kurang efektif, adanya alih fungsi lahan yang mengurangi resapan air, peran pengusaha wisata yang masih kurang terhadap pengelolaan sungai, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal yang belum optimal, dan

- mitigasi bencana yang masih belum optimal.
2. Berdasarkan peran stakeholder dalam pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung dihasilkan bahwa aktor/stakeholder yang paling berpengaruh dan memiliki power yang kuat untuk mempengaruhi stakeholder lain yaitu DPRD Kabupaten Bandung (dengan nilai skala bersih pengaruh 25), BBWS Citarum (dengan nilai skala bersih pengaruh 15) dan Dinas PUTR Kabupaten Bandung (dengan nilai skala bersih pengaruh 2) untuk menjalin kemitraan yang efektif dengan stakeholder lain dan mampu mempengaruhi serta memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pihak. Sedangkan, untuk stakeholder yang memiliki pengaruh rendah dan ketergantungan tinggi yaitu Desa (dengan nilai skala bersih pengaruh -13), Kecamatan (dengan nilai skala bersih pengaruh -13), dan LSM (dengan nilai skala bersih pengaruh -23) bisa lebih dimaksimalkan peran dari masing – masing stakeholder tersebut.
 3. Upaya dalam pengelolaan Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung ditentukan berdasarkan skala prioritas yang dinilai oleh para stakeholder diantaranya adalah Meningkatkan upaya mitigasi bencana di wilayah Sub-DAS Ciwidey (dengan nilai degree of mobilisation 29,3) , Meningkatkan kerjasama antar instansi (dengan nilai degree of mobilisation 25,1), Perlu adanya upaya penanganan alih fungsi lahan (dengan nilai degree of mobilisation 24,9), Meningkatkan peran pengusaha wisata dalam pelestarian Sub-DAS Ciwidey (dengan nilai degree of mobilisation 24,5), dan Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi pertanian masyarakat lokal (dengan nilai degree of mobilisation 24,3)

Acknowledge

Terimakasih kepada kedua orang tua dan berbagai pihak terkait dalam penelitian saya terutama kepada pemerintah dan berbagai pihak yang berkaitan mengenai Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung, serta tidak lupa terimakasih banyak kepada Bapak Dr. Ernady Syaodih, Ir., M.T. dan Ibu Dr. Nia Kurniasari, S.T., M.T. yang telah membimbing penelitian saya.

Daftar Pustaka

- [1] Arsyad, S., 2010. Konservasi Tanah dan Air. IPB PRESS.
- [2] Jannah, R.H., 2018. Perubahan Penggunaan Lahan dan Debit di Sub DAS Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
- [3] Herdiana I, 2022. Salah Arah Pembangunan akan Menuai Bencana di Bandung Selatan. bandungbergerak.id.
- [4] Salman Ashidiq, H., Bettie Puspita, I., 2019. Perubahan Risiko Bencana Banjir Bandang Berdasarkan Perubahan Guna Lahan Dan Peningkatan Jumlah Penduduk Di Wilayah Sekitar Das Mikro Sub Das Ciwidey Tahun 2017 Dan 2036. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Alam*
- [5] Ashidiq, H., Bettie Puspita, I., 2019. Perubahan Risiko Bencana Banjir Bandang Berdasarkan Perubahan Guna Lahan Dan Peningkatan Jumlah Penduduk Di Wilayah Sekitar Das Mikro Sub Das Ciwidey Tahun 2017 Dan 2036. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*
- [6] M. F. Ridho and N. Kurniasari, “Kajian Peran Stakeholder dalam Pembangunan Kota Berbasis Smart Living di Pagedangan Tangerang,” *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*, pp. 9–16, Jul. 2023, doi: 10.29313/jrpk.v3i1.1816.
- [7] Kania Sephiya Sunardi and Lely Syiddatul Akliyah, “Identifikasi Faktor Kurang Berjalannya TPS3R Citepus di Pasawahan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung,” *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*, pp. 159–166, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrpk.v3i2.2758.
- [8] G. Kulalet *et al.*, “Pengaruh Intensitas Curah Hujan terhadap Kegiatan Pemompaan pada Sump berdasarkan Water Balance di PT,” *Journal of Mining Engineering*, vol. 1, no. 1, pp. 25–32, 2023, doi: 10.29313/minetech.vxix.xxx.